



Communication Pattern of the National Unity and Politics Agency in Preventing Terrorism in Poso Regency

Pola Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Tindakan Terorisme di Kabupaten Poso

Anita Indah Rizkia

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Keywords

Communication patterns,
Terrorism prevention,
Poso

ABSTRACT

This study aims to determine how communication patterns and inhibiting factors of the Poso Regency National and Political Unity Agency in preventing acts of terrorism, descriptive qualitative research method. Subject Employees of the Poso Regency National and Political Unity Agency, with the object of the Poso Regency National and Political Unity Agency. Conducting interviews with employees of the Poso Regency National and Political Unity Agency. The results of this study indicate that in the prevention carried out by the National and Political Unity Agency there is a linear communication pattern, and in its prevention there are several inhibiting factors. 1). The existing linear communication pattern is socialization and counseling carried out by the National Unity and Political Unity Agency in preventing acts of terrorism, In this communication process, the message conveyed by the National Unity and Political Unity Agency will be effective if there is planning before carrying out communication. 2). The National Unity and Political Agency of Poso Regency in carrying out prevention gets several obstacles, namely language barriers, there are still sympathizers who make it difficult to carry out prevention, besides that in conducting counseling the National Unity and Political Agency of Poso Regency gets a language barrier in communicating during socialization.

Kata Kunci

Pola komunikasi,
Pencegahan terorisme,
Poso

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi dan faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam melakukan pencegahan tindakan terorisme, metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso, dengan objek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Melakukan wawancara dengan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pencegahan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pola komunikasi linear, dan dalam pencegahannya mendapatkan beberapa faktor penghambat. 1). Pola komunikasi linear yang ada yaitu sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pencegahan tindakan terorisme, Dalam proses komunikasi ini, pesan yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melaksanakan komunikasi. 2). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam melakukan pencegahan mendapatkan beberapa hambatan yaitu hambatan bahasa, masi adanya simpatisan yang mempersulit dalam melakukan pencegahan, selain itu dalam melakukan penyuluhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mendapatkan kendala bahasa dalam melakukan komunikasi pada saat sosialisasi.

*Corresponding author

Anita Indah Rizkia. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako Jln. Soekarno Hatta Km 9 Kota Palu Sulawesi Tengah, Indonesia.

Email: anitaladjami@gmail.com

<https://doi.org/10.22487/j.sochum.v8i2.1907>

Received 16 February 2023; Received in revised form 7 August 2024; Accepted 9 September 2024

Published 30 October 2024; Available online 30 October 2024

e-ISSN 2620-5491 / © 2024 The Authors.

Managed by the Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University. Published by Tadulako University.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/>).

1. Pendahuluan

Konflik yang terjadi di Poso lebih dilihat sebagai aspek SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Namun bila diperhatikan secara cermat, konflik yang terjadi di Poso terbagi 3 fase, yaitu fase pertama adalah kesenjangan sosial ekonomi, fase kedua kesenjangan politik dan di fase terakhir berkaitan dengan agama. Ketiga fase tersebut yang menyebabkan munculnya aksi-aksi kekerasan di Kabupaten Poso dan sekitarnya.

Setelah konflik panjang yang terjadi di Kabupaten Poso, munculah aksi- aksi kekerasan dan tindakan terorisme yang disebabkan oleh persoalan dendam, trauma psikologis, kesulitan ekonomi, hak berpendapat, keputusan dan kasus- kasus yang belum tersentuh secara maksimal oleh pemerintah. Persoalan tersebut yang memicu potensi aksi kekerasan dan tindakan terorisme. Adanya tuntutan komunitas atau kelompok, serta adanya warga muslim yang merasa terzalimi oleh warga nonmuslim, menyebabkan munculnya gerakan yang terorganisasi dalam bentuk gerakan-gerakan organisasi keagamaan yang cenderung radikal karena berbasis ideologi doktriner.

Permasalahan dalam aksi terorisme Poso sejak 2001 sampai 2007 yaitu : pertama, tuntutan/masalah perorangan. Kedua, tuntutan kolektif yang membuat individu-individu secara kolektif memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya. Ketiga, pandangan ideologi atau politik yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tuntutan tersebut. Dan menyebabkan banyak nyawa yang menjadi korban.

Melihat permasalahan yang ada upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai instansi yang tugas dalam menanggulangi dampak terorisme terhadap masyarakat Kabupaten Poso adalah dengan meningkatkan kerukunan umat beragama sebagaimana yang di ketahui bahwa awal mula masalah konflik Poso adalah bermula dari tergerusnya kerukunan hidup umat beragama di kabupaten Poso, karena itu pemerintah saat ini berupaya untuk merajut dan membangun kembali kerukunan hidup umat beragama yang ada di kabupaten Poso. Upaya ini dilakukan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Poso. FKUB Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat penting dalam merajut kembali kerukunan hidup umat beragama, bahkan forum ini berperan aktif dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten Poso tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila agar terbangun kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, saling menghargai satu sama lain antar sesama warga, mengerti dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang bahaya gerakan terorisme, pengetahuan tentang segala peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga dengan demikian masyarakat dapat memahami akan bahaya terorisme dan dapat membentengi diri mereka dari rayuan atau ajakan menjadi anggota teroris.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam pencegahan tindakan terorisme yaitu pola komunikasi linear yang dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuat kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi bersama ex napiter. Materi-materi yang diberikan berkaitan dengan pencegahan tindakan radikalisme.

Pola komunikasi adalah cara seseorang individu atau kelompok itu berkomunikasi. Pola komunikasi dalam tulisan ini adalah cara kerja suatu kelompok ataupun individu dalam berkomunikasi yang didasarkan pada teori-teori komunikasi dalam menyampaikan pesan atau mempengaruhi komunikan. (Purwasito, 2002).

1 Pemahaman tentang pola ini dapat kita ilustrasikan seperti ketika kita akan membuat baju.
2 Ketika seseorang akan membuat baju dia akan membuat pola atau sering disebut pattern,
3 pola ini bersifat fleksibel dan mudah diubah. Pola ini yang akan menentukan bentuk dan
4 model sebuah baju, kemudian setelah melalui beberapa proses, akhirnya dari sebuah baju
5 itu akan kelihatan dan model sebenarnya akan terlihat jelas.

6 Dari ilustrasi di atas, pola komunikasi dapat dipahami dari suatu komunikasi yang
7 bersifat fleksibel dan mudah diubah. Pola ini sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol
8 bahasa yang digunakan dan disepakati oleh kelompok tertentu. Pola komunikasi primer
9 merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan
10 dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi
11 menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal dan lambang nonverbal. Lambang verbal
12 yaitu bahasa sebagai lambang verbal yang paling banyak dan paling sering digunakan,
13 karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator.

14 Lambang nonverbal yaitu lambang yang digunakan dalam berkomunikasi selain
15 bahasa, merupakan isyarat dengan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, dan
16 tangan. Selain itu, gambar juga sebagai lambang komunikasi nonverbal, sehingga dengan
17 memadukan keduanya maka proses komunikasi dengan pola ini akan lebih efektif.
18 (Effendy, 2006). Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik, karena model ini
19 merupakan model pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles hidup pada
20 saat retorika sangat berkembang sebagai bentuk komunikasi di Yunani, terutama
21 keterampilan orang membuat pidato pembelaan di muka pengadilan yang dihadiri oleh
22 rakyat menjadikan pesan atau pendapat yang dia lontarkan menjadi dihargai orang
23 banyak. Berdasarkan pengalaman itu Aristoteles mengembangkan idenya untuk
24 merumuskan suatu model komunikasi yang didasarkan atas tiga unsur yaitu:
25 komunikator, pesan, komunikan. (Cangara, 2005).

26 Pola komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan oleh komunikator
27 kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah
28 memakai lambang pada media pertama. Komunikator menggunakan media kedua ini
29 karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh tempatnya, atau banyak jumlahnya.
30 Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan semakin efektif dan
31 efisien, karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih. Pola
32 komunikasi ini didasari atas model sederhana yang dibuat Aristoteles, sehingga
33 mempengaruhi Harold D. Lasswell, seorang sarjana politik Amerika yang kemudian
34 membuat model komunikasi yang dikenal dengan formula Lasswell pada tahun 1984.
35 (Cangara, 2005)

36 Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke
37 titik lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada
38 komunikan sebagai titik terminal. Jadi dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi
39 dalam komunikasi tatap muka (*face to face*), tetapi adakalanya komunikasi bermedia.
40 Dalam proses komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada
41 perencanaan sebelum melaksanakan komunikasi. Shannon bersama Weaver pada tahun
42 1949 menerapkan proses komunikasi manusia (*human communication*) yang berakar dari
43 teori matematik dalam komunikasi permesinan (*engineering communication*). Model
44 matematikal tersebut menggambarkan komunikasi sebagai proses linear. (Effendy, 2005)

45 Salah satu pola yang digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi adalah
46 pola sirkuler yang dibuat oleh Osgood bersama Schramm. Kedua tokoh ini mencurahkan
47 perhatian mereka pada peranan sumber dan penerima sebagai pelaku utama komunikasi.
48 Pola ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, di mana pesan

ditranmisit melalui proses encoding dan decoding. Encoding adalah transilasi yang dilakukan oleh sumber atas sebuah pesan, dan decoding adalah transilasi yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan yang berasal dari sumber. Hubungan antara encoding dan decoding adalah hubungan antara sumber dan penerima secara stimultan dan saling mempengaruhi satu sama lain (Cangara, 2005). Sebagai proses yang dinamis, maka *interpeter* pada pola sirkular ini bisa berfungsi ganda sebagai pengirim dan penerima pesan. Pada tahap awal, sumber berfungsi sebagai encorder dan penerima sebagai decorder. Tetapi pada tahap berikutnya penerima berfungsi sebagai pengirim (*encorder*) dan sumber sebagai penerima (*decorder*), dengan kata lain sumber pertama akan menjadi penerima kedua dan penerima pertama berfungsi sebagai sumber kedua, dan seterusnya.

Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. (Hendropriyono, 2009) Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengkoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada. (Nainggolan, 2006)

Poul Johnson memberikan arti terorisme adalah sebagai pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik, terorisme adalah suatu kejahatan politik, yang dari segi apa pun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat yang menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan yakni tentang pencegahan tindakan terorisme yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait dengan pola komuniaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam melakukan pencegahan mengenai tindakan terorisme kepada masyarakat dengan cara mengkontruksi wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang menggambarkan atau menjabarkan mengenai suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki.

Dasar penelitian ini merupakan metode studi kasus (*case study*) menurut (Kriyanto 2007), merupakan metode riset menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang biasa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa, secara sistematis. dalam penelitian ini yang diangkat menjadi permasalahan adalah bagaimana Pola Komunikasi yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan tindakan terorisme.

Secara sederhana, objek penelitian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang ingin dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah Pola Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso terkait pencegahan tindakan terorisme. Subjek dalam penelitian ini di tentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keberadaan subjek penelitian penting

1 untuk memahami permasalahan yang ada dan mengamati fenomena yang muncul serta
2 melakukan analisis atas tanggapan berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada subjek
3 penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah 4 narasumber dari bagian struktu Badan
4 Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.

5 Data Primer yang didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung dan
6 mendalam bersama 4 orang informan. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data
7 melalui pengamatan tanpa partisipasi pada proses aktif dan selektif terhadap hal-hal yang
8 berhubungan dengan pola komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
9 Poso. Data skunder diperoleh dari buku, jurnal, situs resmi Badan Kesatuan Bangsa dan
10 Politik Kabupaten Poso, berita-berita di media sosial dan foto-fot kegiatan serta literatur
11 lainnya.

12 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
13 kualitatif yang dilakukan dengan memperjelas dan (Milles & Huberman 2009). Data yang
14 terkumpul dari hasil pengamatan dan wawancara lapangan selanjutnya dianalisis dan
15 disajikan bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kata-kata atau narasi
16 berdasarkan dengan tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya maka analisis data
17 yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

18 19 **3. Hasil Penelitian**

20 Keberadaan MIT yang merupakan kelompok ekstremis Islam ini diketahui
21 beroperasi di Poso, Sulawesi Tengah, dan telah menyebar teror selama 10 tahun terakhir.
22 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso melakukan aksi teror penembakan
23 dan pembunuhan Polisi dan warga sipil pada 8 Agustus 2020 serta pembunuhan di Dusun
24 Lima Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi
25 Tengah pada 20 November 2020. Kelompok ini juga membantai satu keluarga petani kopi
26 di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso pada tanggal 11 Mei 2021.
27 Banyaknya peristiwa pembunuhan yang terjadi menimbulkan keresahan pada
28 masyarakat.

29 Dalam upaya menncegahan tindakan terorisme Badan Kesatuan Bangsa dan
30 Politik Kabupaten Poso, membuat beberapa program yaitu sosialisasi, penyuluhan kepada
31 anak sekolah dan diskusi bersama ex napiter. Yang dimana program ini dibuat sebagai
32 upaya meminimalisir terjadinya konflik terorisme di Kabupaten Poso. Pada kegiatan yang
33 dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mereka memberikan materi mengenai
34 pencegahan tindakan terorisme, dan yang menjadi pemateri dari kegiatan tersebut tidak
35 hanya dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tetapi ada juga dari beberapa
36 instansi, yaitu: Kepolisian, Kementerian Agama, Dinas Soisial dan dinas-dinas lainnya.

37 Yang menjadi sasaran pencegahan tindakan terorisme yaitu Masyarakat, dan
38 siswa SMA. Dalam melakukan pencegahan terhadap anak SMA dan masyarakat, Badan
39 Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso melakukan penyuluhan kepada siswa SMA
40 dan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga-lembaga keagamaan yang
41 ada di Kabupaten Poso. Selain penyuluhan dalam upaya pencegahan tindakan terorisme,
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga membuat kegiatan sosialisasi wawasan
43 kebangsaan, yang dimana tujuan dari kegiaian ini ialah untuk mewujudkan nasionalisme
44 yang tinggi dari segala aspek kehidupan Rakyat Indonesia dan mengutamakan
45 kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku
46 bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari
47 kepentingan nasional. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
48 Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, dinilai belum berpengaruh secara maksimal kepada

peserta sosialisasi tersebut, karena peserta kegiatan tersebut belum langsung menerima materi yang diberikan oleh narasumber. Mayoritas masyarakat peserta sosialisasi menganggap apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan tuntunan agama yang mereka anut.

4. Pembahasan

Dalam melakukan pencegahan ada beberapa faktor menyebabkan Pemerintah sulit memberantas terorisme di Poso. Sejak tahun 2000-an, para teroris membaaur dengan masyarakat. Mereka 26 menikah dengan orang lokal. Masyarakat setempat ketika itu tidak menganggap mereka teroris, karena ketika konflik terjadi, mereka membela umat Islam. Sebagian masyarakat menganggap mereka pahlawan. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan kelompok teroris ini dapat hidup hingga 5 tahun terakhir ini (bahkan sudah sekitar 11 tahun jika dihitung sejak masa pra Ali Kalora). Kelompok ini bisa bertahan lama juga karena faktor medan yang berhutan-hutan.

Dalam melakukan pencegahan yang menjadi penghambat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam mensosialisasikan pencegahan terkait paham radikal terdapat pada peserta sosialisasi yang dibatasi jumlahnya hanya 50 orang yang bisa mengikuti sosialisai, sedangkan 50 orang tersebut masi sangat kurang dalam mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh paham-paham radikal, 50 orang tersebut belum isa dianggap mampu merepresentasikan apa yang mereka dapatkan materi yang didapatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat tempat mereka tinggal. Penyebab sulitnya mencegah tindakan terorisme yaitu masi adanya simpatisan yang mendukung tindakan terorisme. simpatisan ini bukan hanya berasal dari masyarakat Poso, tetapi ada juga yang berasal dari luar Sulawesi tengah, yang menganggap Poso sebagai daerah jihad. Simpatisan inilah mendukung dan membatu aksi terorisme dalam di Kabupaten Poso organisasi.

Selain itu, yang menjadi penghambat dalam pencegahan tindakan terorisme masyarakat menjadi faktor penghambat yaitu masi rendahnya dukungan masyarakat dalam sosialisasi yang dibuat oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. dalam hal ini pemerintah harus lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat satu pemahaman dengan pemerintah dan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan. Faktor penghambat utama dalam pencegahan tindakan terorisme di Kabupaten Poso yaitu simpatisan karena jika masi ada simpatisan pemerintah akan mengalami kesusahan dalam melakukan pencegahan. Karena simpatisanlah yang membantu teroris. Bantuan yang dilakukan oleh simpatisan ini berupa makanan, dan pendanaan. Simpatisan ini bukan hanya masyarakat Poso tetapi orang yang di luar Sulawesi tengah, yang menjadikan Poso sebagai daerah jihad.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam Pencegahan Tindakan Terorisme. maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam melakukan pencegahan badan kesatuan bangsa dan politik melakukan berbagai macam usaha, dari usaha pencegahan tersebut proses komunikasi yang di lakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politk kabupaten poso yaitu pola komunikasi linear, yang dianggap mampu meminimalisir terjadinya tindakan terorisme. Pola komunikasi linear ini dianggap mampu untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme, badan kesatuan bangsa dan politik dalam melakukan pencegahan membuat program sosialisasi. Melalui sosialisasi tersebut badan kesatuan

1 bangsa dan politik Kabupaten poso menggap itu cara yang baik untuk mencegah tindakan
2 terorisme. Dalam melakukan pencegahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
3 Poso mempunyai banyak hambatan yaitu hambatan bahasa, masi banyaknya simpatisan
4 yang membuat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sulit dalam melakukan pencegahan,
5 selain itu dalam melakukan penyuluhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
6 Poso mendapatkan kendala bahasa dalam melakukan komunikasi pada saat sosialisasi.

8 Referensi

- 9 Am, Hendropriyono. 2009. *Terorisme*. Jakarta: PT. Kompas
10 Cangara, Hafied. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
11 Effendy, Onong Uchjana. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja
12 Rosdakarya
13 Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja
14 Rosdakarya
15 Nainggolan, Potak Pantogi. (2006). *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta:Pusat
16 Pengkajian dan Pelayanan Informasi
17 Purwasito, Andrik. 2002. *Komunikasi Multikultural*: Surakarta: Muhammadiyah
18 University PressBudi, Rayaduswati. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Makassar:
19 Kretakupa
20 Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana
21 Perdana
22 Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:
23 UI-Press.